

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan berbahasa Jawa kuno, terdiri dari dua kata majemuk tunggal, yaitu Bhineka dan Ika serta tunggal dan ika. Secara harfiah mempunyai arti *Beda Itu Tunggal* kemudian dimaknai dengan berbedabeda tapi tetap satu jua. Semboyan ini pernah dipakai oleh pujanga kenamaan Nusantara Mpu Tantular dalam bukunya Sutasoma. Buku ini ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit pada pertengahan abad ke 14 dalam buku itu istilah ini dipakai oleh Mpu Tantular untuk menyebutkan betapa rukunnya umat beragama pada waktu itu.<sup>1</sup>

Setelah menjadi Semboyan pada lambang negara Indonesia, maka kalimat itu bukan saja menggambarkan kenyataan objektif dalam lapangan agama saja, tetapi Bhineka Tunggal Ika menggambarkan berbagai kenyataan dan keberadaan bangsa Indonesia yang pluralitas ini. Baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat tempat tinggal dan sebagainya.<sup>2</sup>

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah berjuang membangun konsensus bersama untuk memberikan “Bangunan dan jiwa” dari negara yang akan baru lahir di bumi Nusantara. Setelah melalui dialog yang sangat panjang dalam dinamika ideologisasi, akhirnya disepakati pondasi dasar dari negara yang baru lahir tersebut adalah; Pancasila, UUD Negara Indonesia 1945, Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Akmal Sutja, *Sekitar Garuda Pancasila*, Angkasa, Bandung 1986. Hal 62

<sup>2</sup> Akmal Sutja, *Sekitar Garuda Pancasila...* Hal 63

Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap komponen bangsa harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita), di antaranya adalah melakukan Revolusi Mental Karakter Bangsa (Nawacita Nomor 8), serta Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.<sup>4</sup>

Sejarah kehidupan beragama di Indonesia menginginkan bahwa setiap umat beragama mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan Kraton atau Kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat dilihat bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil.

---

<sup>3</sup> Tappil Rambe, *Membingkai Kebhinekaan dan Kedaulatan Dalam Berbangsa Dari Sudut Pandang Sosial Politik Nasional*, (Medan, FIS, Unimed) VOLUME 10, NOMOR 2, Hal 211

<sup>4</sup> H. Munir Salim, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara*, (Uina Aalauddin, Makasar, Vol. 6 / No. 1 / Juni 2017)

Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika", yang dapat dimaknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok sukubangsa semata namun kepada konteks kebudayaan.

Sepanjang era reformasi Indonesia menampilkan banyak peristiwa yang menunjukkan perubahan kehidupan warga, baik secara individu atau kelompok, dalam berkehidupan kemasyarakatan, kehidupan berkenegaraan, dan kehidupan berkebangsaan. Faktor utama mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, baik oleh rakyat, dan bahkan pemimpin atau penguasa mengindikasikan gejala memudar. Kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan terjadinya konflik antar individu, kelompok masyarakat yang berbeda agama, ras, suku/etnik, budaya, dan berbeda kepentingan, serta rendahnya moral penguasa seperti banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat hukum akibat korupsi.

Berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang syarat dengan integrasi nasional dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai budaya bangsa sebagai keutuhan, kesatuan, dan persatuan negara bangsa harus tetap dipelihara sebagai pilar nasionalisme.<sup>5</sup>

Dalam konsep multikulturalisme penekanan terletak pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun kelompok atau masyarakat. Individu dilihat sebagai refleksi dari satuan sosial dan budaya tempat mereka menjadi bagian dari satuan itu. Permasalahannya bukan

---

<sup>5</sup> Tappil Rambe, *Membingkai Kebhinekaan dan Kedaulatan Dalam Berbangsa Dari Sudut Pandang Sosial Politik Nasional...* Hal, 2.

terletak pada perbedaan kebudayaan ataupun pada hubungan budaya dengan berbagai corak akulturasi, yang menghasilkan warga masyarakat multikultural yang multikulturalis, melainkan pada saat hubungan antar budaya tersebut bergeser menjadi hubungan antarjati diri. Pada saat hubungan antar jatidiri masih berada dalam ruang lingkup kerja, atau berdasarkan atas status-status sosial yang diperoleh, hubungan antarjatidiri yang berlangsung akan mengacu pada struktur satuan sosial tempat interaksi sosial tersebut berlangsung. Akan tetapi, pada saat hubungan tersebut menjadi hubungan antar jati diri yang mendasar dan umum, maka acuan bagi jatidiri yang digunakan adalah sukubangsa. Hubungan antarjati diri yang menjadi hubungan antarsukubangsa menafikan peranan pemahaman antarbudaya yang mengakomodir perbedaan-perbedaan, dan sebaliknya menekankan penggunaan stereotip dan prasangka untuk mempertegas perbedaan dan batas-batas sukubangsa di antara mereka<sup>6</sup>

Di sini multikulturalisme dilihat sebagai pengikat dan jembatan yang mengakomodir perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan sukubangsa dalam masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme mengacu pada pengertian bahwa perbedaan-perbedaan tersebut terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja, pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Kesukubangsaan dan masyarakat sukubangsa dengan kebudayaan sukubangsanya tetap dapat hidup dalam ruang lingkup atau suasana kesukubangsanya. Walau demikian, dalam suasana nasional dan tempat-tempat umum yang seharusnya

---

<sup>6</sup> Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan*, (Depok, Universitas Indonesia), Hal, 32

menjadi ciri di situ adalah kebangsaan dengan pluralisme budayanya; bukan suatu kesukubangsaan atau suatu kebudayaan sukubangsa tertentu yang dominan.<sup>7</sup>

Menurut Soekarno motto Bhineka Tunggal Ika Soekarno, Ia sangat sangat mendukung nilai-nilai pluralisme yang telah menjadi salah satu bagian dari karakter bangsanya. dalam pandangannya, Indonesia adalah rumah tempat berteduh bagi semua suku, pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Mereka bisa tinggal dan hidup bebas di tanah indonesia dan dilindungi oleh negara. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” adalah manifestasi bagaimana bangsa Indonesia yang berbeda-beda (Budaya, Agama, Suku), namun tetap satu.<sup>8</sup>

Dari perjalanan sejarah politik yang ada, sosok Soekarno diakui memainkan peran sentral khususnya dalam sejarah politik Indonesia bahkan menjadi tokoh yang tak selesai-selesai dibicarakan. Sejarah Indonesia mencatat Soekarno sebagai manusia yang penuh kontroversi dalam kepribadiannya dan telah menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda dikalangan bangsanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan...* Hal, 32

<sup>8</sup> Sigit Aris Prasetyo, *Bung Karno dan Revolusi Mental (Cet: Pertama, Tangerang, Imania)*, hal 37

<sup>9</sup> Solichin salam, *Bung Karno Dalam Kenangan, (Jakarta Pustaka, 1981) hal 8*

Soekarno menyerap gagasan Islam, Komunisme dan Nasionalisme yang menjadi arus besar Ideologi dominan yang pada saat itu gencar melakukan perlawanan terhadap segala bentuk praktik-praktik eksploitasi dan penindasan para kolonial.

Soekarno memandang Islam sejati tidaklah mengandung azas anti-nasionalis; Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis, sebaliknya Islam itu mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis dan menetapkan kewajiban-kewajibannya yang menjadi kewajiban-kewajiban nasional pula. Dalam hal ini Soekarno menolak paham islam yang berlandaskan pada fanatisme yang melebihi bangsa.

Menurut Soekarno kaum Islam tak boleh lupa bahwa pandangan Marxisme tentang Materialisme-history menjadi petunjuk bagi rakyat untuk memahami soal-soal tentang ekonomi dan politik dunia yang sukar dan sulit. Materialisme-history juga menerangkan kejadian-kejadian di bumi yang telah terjadi yang amat berguna bagi rakyat.

Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme di dunia Timur itu lantas terpadu dengan Maxisme menjadi satu nasionalisme Baru. Nasionalisme Baru inilah yang kini hidup dikalangan rakyat Marhaen Indonesia yang harus tumbuh berkembang untuk mewujudkan kedaulatan yang sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah kunjung usai seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan, ketergantungan kepada asing, korupsi dan masalah – masalah kebangsaan lainnya yang itu mutlak harus diperangi.

Soekarno Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme yang internasionalisme, nasionalisme yang bergetar hatinya untuk membela apabila melihat masih ada bangsa yang terjajah. Sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme yang berpandangan sempit dan menumbuhkan *chauvinisme*, intoleran atau disebut *xenophobia*. Sosio-nasionalisme juga bukan nasionalisme yang hanya berorientasi pada internasionalisme *minded* saja, tanpa memperhatikan harga diri atau identitas nasional atau disebut *xeno mania*. Bagi Marhaenisme, internasionalisme harus dibarengi oleh nasionalisme atau patriotisme dan disebut sosio-nasionalisme berperikemanusiaan, nasionalisme yang lapang dada, nasionalisme yang Sosio-nasionalisme diartikan sebagai nasionalisme masyarakat yang mencari keselamatan bagi seluruh masyarakat. Jelas nasionalisme Marhaen sangat anti terhadap sistem *borjuisme* yang menjadi penyebab kepincangan sistem dalam masyarakat. Sosio-nasionalisme juga merupakan nasionalisme politik dan ekonomi yang berusaha untuk mencari keamanan politik dan keamanan ekonomi.

Sosio-demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik hanya akan melahirkan *political power centris* yang menyuburkan aliran yang berpedoman pada adagium "*The survival of the fittest*," dalil sosial Darwinisme. Menurut Sukarno, demokrasi politik yang seperti ini berwatak liberalisme dan menjurus kepada *free fight competition* dan bertentangan dengan Marhaenisme yang sosialis. Dengan demikian, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sejajar dengan Marhaenisme Apabila Marhaenisme dikembangkan maka akan melahirkan Sosionasionalisme menjadi

nasionalisme, perikemanusiaan dan Sosio-demokrasi menjadi demokrasi, kedaulatan politik dan keadilan sosial. Demokrasi masyarakat tumbuh karena sosio-nasionalisme yang merangkul semua seluruh kepentingan masyarakat Indonesia.

Sosio-demokrasi sebagai reaksi dari demokrasi Barat. Menurut Sukarno demokrasi Barat dianggap lebih bersifat liberalis. Sementara pergerakan rakyat Marhaen lebih disebabkan karena kemerlaratan yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan bisa tercapai jika imperialisme dan kapitalisme telah hilang di negeri ini dengan syarat kemerdekaan dan kekuasaan ditangan Marhaen. Tantangan yang begitu besar bagi kaum Marhaen untuk melakukan sebuah pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-akarnya. Perubahan itu harus didukung oleh kemauan yang besar dari masyarakat sendiri dengan melakukan massa aksi Sukarno selalu memperingatkan kepada massa Marhaen untuk tidak meniru demokrasi yang dipraktekan di luar negeri. Dia yakin demokrasi seperti itu (parleментар) tidak akan menjamin hak-hak politik, tidak menjamin kesejahteraan rakyat, dan menambah keterpurukan dalam bidang ekonomi. Mengenai bahaya Demokrasi barat (parleментар) Sukarno justru mengkritisi perjuangan kaum proletar yang tidak mendapatkan haknya setelah kemerdekaan karena demokrasi parlemen itu. *Liberte, fransternite, egalite*, hanya semboyan untuk membakar semangat massa namun setelah tujuan tercapai massa tidak mendapatkan haknya karena kapitalisme tetap subur dan memihak golongan atas



Dalam perjalanannya konsep Nasionalis, Islamisme, dan Marxisme Sukarno berubah menjadi Nasakom; Nasionalis, Agama, dan Komunis. Sukarno memperluas konsep Islamisme menjadi Agama, yang harapannya semua agama bisa terwakili dalam konsep persatuannya tersebut. Sukarno benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kebhinekaan tiga golongan ini menjadi Tunggal Ika, dalam balutan Ibu pertiwi walau sebenarnya Sukarno sadar benar golongan-golongan ini rentan sekali bertikai karena perbedaan paham yang sangat lebar.<sup>10</sup>

Sisi lain pada diri Soekarno selain ia sebagai orator ulung dan pemimpin revolusi, ia juga penganut sejati tiga ideologi besar: Nasionalisme, Agama, dan Marxisme. Tiga ideologi besar inilah yang kemudian dijadikan sebagai prinsip atau pegangan utuh dalam hidupnya. Kita menemukan ketiga-tiganya terepresentasi dalam diri Soekarno.

Soekarno pernah menulis tentang “Nasionalisme, Islamisme, dan Markisme” di Indonesia Muda (IM) yang diterbitkan oleh Komite Persatuan Indonesia (CPI). CPI sendiri berdiri di Bandung pada tahun 1926. Dalam tulisan yang dimuat tiga nomor berturut-turut itu sangat tampak sekali bagaimana antusiasme Soekarno dalam melakukan ajakan kepada tiga ideologi tersebut. Soekarno memandang nasionalisme sebagai suatu paham yang harus senantiasa dijadikan napas. Tanpa nasionalisme tak mungkin ada perjuangan dan pengorbanan yang signifikan untuk berkelanjutan hidup berbangsa dan bernegara.

Memahami nasionalisme tidak kemudian bersikap cinta tanah air dan antipati terhadap bangsa lain. Pemahaman semacam ini adalah bagian dari

---

<sup>10</sup> Kuswono, *Marhenisme Social Ideologi Create By Soekarno...*Hal 122

Nasionalisme sempit (ekselusif) yang tidak sejalan dengan paham Soekarno. Soekarno memberikan formula praktis tentang Nasionalisme yang mengusung spirit kebangsaan, penuh martabat, dan tidak merendahkan bangsa lain.<sup>11</sup>

Demikian juga dengan Islamisme dan Marxisme atau Sosialisme. Soekarno memandangkan paham kedua-duanya dengan coba melakukan penentangan terhadap kapitalisme yang jelas-jelas mengakibatkan terjadinya kelas-kelas sosial yang destruktif. Kapitalisme di mata Soekarno adalah bentuk ideologi yang cukup berbahaya, karena akibat yang ditimbulkannya tidak lain adalah penindasan terhadap rakyat miskin. Karena itu dengan ideologi Sosialisme-Marxismenya, ia tidak ragu mengklaim bahwa kapitalisme, sejatinya adalah bentuk dari kejahatan yang terselubung penindasan yang berkedok kesejahteraan dan keadilan. Kenapa demikian? Karena kapitalisme-lah yang berperan menjadikan seseorang individualitas konsumsivistik.<sup>12</sup>

Marxisme yang baru tidaklah menolak pekerjaan bersama-sama dengan nasionalis dan islamis, marxisme yang baru menyokong pergerakan-pergerakan nasionalis dan islamis yang sungguh-sungguh. Marxisme yang masi saja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan islamis yang keras, marxisme yang demikian itu tidak mengikuti aliran zaman, dan tidak mengerti akan marxisme yang sudah berubah.

Menurut Soekarno marxisme yang sekarang adalah berlainan dengan marxisme yang dulu marxisme yang dulu sikapnya begitu sengit anti kaum kebangsaan dan anti kaum keagamaan maka sekarang sudah begitu dirobah

---

<sup>11</sup> Andi Setiadi, *Soekarno Sang Bapak Bangsa*, (Cet. I Yogyakarta: Laksana, 2017), hal 67

<sup>12</sup> Andi Setiadi, *Soekarno Sang Bapak Bangsa...* Hal. 69

hingga kesengitan anti ini sedah berbalik menjadi persahabatan, marxisme memang seharusnya berubah marx dan engels bukanlah nabi-nabi yang bisa mengadakan aturan-aturan yang bisa terpakai untuk segala zaman.<sup>13</sup>

Idiologi besar yang dipegang Soekarno tidak hanya menjadikan dirinya memiliki cara pandang yang luas, tetapi juga bijak dalam merumuskan indonesia sebagai sebuah negara. Soekarno mengerti bagaimana cara yang tepat dalam membentuk negara kesatuan ditengah perbedaan Suku, Ras, dan Agama. Bersama kawan-kawan seperjuangannya, Soekarno mencoba merangkul semua elemen masyarakat, elemen suku yang terbentang luas dari sabang hingga Marauke, dalam satu wadah bernama negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Istila NKRI menurut Abdurahman wahid, dipakai oleh Soekarno dan para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa. Bersama para *founding fathers*, Soekarno akhirnya merumuskan NKRI karena landasan idiologi yang kuat yang dibahas sebelumnya. Tanpa tiga Idiologi besar yang dimilikinya, mustahil Soekarno mampu merumuskan, mengongsep, dan merealisasikan perjuangan negeri yang saat itu baru merdeka menuju terbentuknya NKRI.<sup>14</sup>

Sejarah berdirinya republik ini banyak kita jumpai konflik-konflik horizontal yang akar persoalannya dipacu oleh semangat eksklusifisme, baik yang bernuansa etnis atau agama, konflik semacam inilah yang kadang berujung pada keinginan-keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI karena sudah

---

<sup>13</sup> Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi 1964*

<sup>14</sup> Andi Setiadi, *Soekarno Sang Bapak Bangsa, (Cet.1 Yogyakarta:laksana,2017)*,Hal 76

dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok separatis yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, dengan segenap optimis yang tak pernah padam dikobarkan oleh Soekarno, maka jalan menuju terwujudnya integritas bangsa yang kokoh selalu disuarakan dengan lantang. Sebab, kata Soekarno hanya dengan begitu bangsa Indonesia bisa diselamatkan dari berbagai kepentingan asing yang menindas. Ketika semangat integritas bangsa sudah demikian sedemikian berkobar dan terinternalisasikan dalam jiwa masing-masing individu, maka tidak mustahil bangsa Indonesia akan meraih peradaban gemilang, sebagaimana yang dicita-citakan.

Nasionalisme Indonesia menggambarkan ikatan budaya yang menyatukan dan mengikat rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam ikatan negara-bangsa (*Nation State*). Dalam upaya menyatukan pada sebuah ikatan itu, maka diperlukan ikatan budaya sebagai pendorong hidup bangsa. Berkembangnya nasionalisme Indonesia sangat bergantung pada kohesivitas dalam bentuk ketahanan budaya yang bertumpu pada ikatan budaya tersebut. Ikatan ini mampu menjadi daya tahan yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi yang cenderung berdampak pada peniadaan batas-batas teritorial dan kedaulatan bangsa.

Dalam konteks keIndonesiaan, perkembangan rasa kebangsaan lebih dulu berkembang daripada rasa kenusaan. Rasa kebangsaan yang muncul dalam masyarakat Indonesia dipicu oleh formasi masyarakat kolonial yang bersifat rasial. Seperti diketahui bahwa periode munculnya pergerakan nasional bersamaan dengan puncak perkembangan masyarakat kolonial yang merupakan produk dari

kolonialisme Belanda di Indonesia. Dalam masyarakat kolonial itu posisi dan peranan masyarakat Indonesia dipinggirkan oleh kaum kolonialis. Dengan berbagai cara, kaum kolonialis menguasai kehidupan masyarakat Indonesia: intimidasi, mengadu domba, hingga invasi dan aneksasi. Bahkan kekuatan kolonial berusaha melanggengkan perampasan itu dengan menciptakan tata hukum yang mereka buat, sehingga seolah-olah kehadiran mereka memiliki dasar legalitas. Dengan cara begitu, mereka mencoba untuk menciptakan masyarakat kolonial dengan semangat apartheid. Basis rasial digunakan untuk menciptakan hukum-hukum kolonial.<sup>15</sup>

Dari berbagai pengertian konsep integrasi nasional tersebut dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, ketika formasi sebuah bangsa sudah terwujud sebagai hasil dari tumbuhnya semangat nasionalisme dan selanjutnya berhasil membentuk sebuah negara-bangsa, maka negarabangsa ini akan meminta kepada segenap warga negara-bangsa itu untuk memiliki kesetiaan. Tuntutan itu bukan saja ditujukan kepada sekelompok orang atau komunitas yang sejak awal memperjuangkan terbentuknya bangsa tersebut, tetapi juga orang-orang yang kemudian menjadi warga negara-bangsa itu. Mereka dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada bangsa dan negara baik dalam masa-masa sulit maupun masa-masa kejayaan, diwajibkan untuk membayar pajak, mengikuti wajib militer di saat perang, mengikuti pemilihan umum dan sebagainya. Berbagai kebijakan itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara-bangsa untuk mewujudkan integrasi nasional di dalam negara Bangsa itu. Tanpa upaya untuk mewujudkan

---

<sup>15</sup> Singgih Tri Sulistiyono, *Nasionalisme Negara Bangsa Dan Integrasi Nasional Indonesia*, (Fakultas Ilmu Budaya Ponegoro), Vol. 3 , No. 1, 2018, Hal, 6

integrasi bangsa, maka tidak menutup kemungkinan bangsa yang semakin heterogen akan mengalami keterpecahan atau disintegrasi.<sup>16</sup>

Integritas bangsa adalah hal yang bersifat fundamental. Soekarno menyadari akan pentingnya itu. Dengan integritas, bangsa kita yang bermacam-macam suku, ras, dan agama, akan bersatu padu untuk mengibarkan Indonesia yang merdeka, yang benar-benar lepas dari cengkraman asing, dan memiliki peradaban yang tinggi. Semangat integritas yang dirumuskan oleh Soekarno meniscayakan bahwa bangsa ini harus bersatu padu dalam mewujudkan Indonesia masa depan. Bersatu pada dalam realitas yang berbeda baik karena faktor Ras, Suku, dan Agama, akan menumbuhkan gairah nasionalisme atas nama bangsa dan negara tercinta.<sup>17</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Keragaman budaya atau “*Cultural Diversity*” adalah kepercayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok sukubangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah

---

<sup>16</sup> Singgih Tri Sulistiyono, *Nasionalisme Negara Bangsa Dan Integrasi Nasional Indonesia...* Hal. 7

<sup>17</sup> Andi Setiadi. *Sisi Lain Bung Karno*. (Cet 1. Yogyakarta. Palapa, 2016) hal 78

tersebut. kondisi geografis yang bervariasi. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang unik ini dapat dilihat dari budaya gotong royong, teposliro, budaya menghormati orang tua (cium tangan), dan lain sebagainya.

Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.<sup>18</sup>

Khususnya dalam toleransi antara agama dan budaya Bahwa agama-agama mayoritas besar tidak selayaknya menghancurkan agama kecil, melainkan belajar untuk mentoleransi dalam semangat keBhinekaan seperti dari pengalam kitan Sutasoma. Pesan-pesan keBhinekaan akhirnya menginspirasi Muhammad Yamin untuk mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar untuk membangun toleransi antar agama dan antar kepercayaan bagi bangsa Indonesia, dan kemudian menjadi sebuah motto bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar filosofos penetapan makna Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam lambang Negara Indonesia?

---

<sup>18</sup> <https://coretanandrea.wordpress.com/2013/11/03/323/>

<sup>19</sup> Mohammad Imam Farisi, *Ekstrapolasi konsep Bhineka Tunggal Ika Sebagai Doktrin Politik Kerajaan Dalam Ranah Pendidikan*, (Surabaya, Unair Mulyorejo, 2013), Nomor 3, hlm. 196.

2. Bagaimana pandangan Soekarno terhadap makna yang ada di balik semboyan Bhineka Tunggal Ika?

Agar penelitian ini lebih terarah, untuk menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka peneliti perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah konsep Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif Soekarno terutama terkait dengan dua hal yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Dengan kata lain, peneliti harus melihat sejauh mana upaya Soekarno dalam menyatukan masyarakat Indonesia terdiri atas latar belakang yang berbeda-beda.

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana terbentuknya konsep Bhineka Tunggal Ika dan untuk mengetahui siapa berperan dalam penetapan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Soekarno terhadap makna yang ada di balik semboyan Bhineka Tunggal Ika.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk akademisi yang akan meneliti tentang ini.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Penelitian ini bermanfaat untuk generasi mendatang apabila mencari sumber bacaan penelitian.



Penelitian ini secara praktis untuk:

1. Agar dapat memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat membangun kehidupan yang rukun antar suku bangsa maupun masyarakat, sehingga dapat bersikap toleransi dan hidup rukun berdampingan.
2. Agar dapat menciptakan lingkungan yang toleransi, harmonis, dan rukun dalam berhubungan sosial budaya.

#### **E. Kajian pustaka**

Sejauh pengetahuan peneliti, belum banyak dijumpai karya ilmiah yang berjudul persis dengan judul dengan judul yang ditulis *Konsep Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Soekarno*. Namun, beberapa karya ilmiah sedikit banyak yang mengarahkan kajian mengenai objek seperti yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hamdan Hamid nim 1073100028 pada tahun 2012 mahasiswa dari uin sultan syarif kasim riau, program studi aqidah filsafat fskultas ushuluddin uin sultan syarif kasim riau dengan judul *Demokrasi ala Soekarno (demokrasi terpimpin)* skripsi ini membahas tentang politik pemerintah rakyat atau bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyat dapat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya, untuk mengungkap sebuah jawaban yang terpendam dalam sistem demokrasi terpimpin.

Menurut hemat penulis adanya kesimpang siuran antara sistem demokrasi terpimpin yang ditawarkan Soekarno dengan pemahaman orang-orang sekarang dalam memandang sistem demokrasi itu sendiri dengan kata lain, demokrasi sudah mengalami pemahaman yang berbeda baik dikalangan elit politik, para pemikir maupun masyarakat umum. Perbedaan antara penelitian skripsi yang

disusun oleh Hamdan Hamid membahas demokrasi ala Soekarno, politik pemerintah rakyat atau bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyat dapat memerintah dengan perantara rakyat-rakyatnya.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Farid nim 12510022 pada tahun 2002, mahasiswa uin sunan kali jaga yogyakarta dengan judul *pemikiran marhaenisme soekarno dalam perspektif filsafat sosial*. skripsi ini membahas tentang pokokpemikiran marhaenisme soekarno, bagaimana pemikirannya tentang marhenisme dan tujuan merhenisme sebagai analisis sosial.<sup>21</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Arfandi A. Cenne nim E11110256 pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul pemikiran politik soekarno tentang nasakom rentang 1959-1966. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemikiran politik soekarno tentang nasakom praktik/implementasi pemikiran politik soekarno tentang nasakom.<sup>22</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh susi lestari nim 02121068 pada tahun 2010, mahasiswa uin sunan kali jaga jurusan sejarah dan kebudayaan islam fakultas adab dengan judul pengaruh islam dalam pemikiran soekarno tahun 1915-1935. Skripsi ini membahas tentang kontruksi islam dalam pemikiran politik Soekarno dan persinggungan islam dalam pemikiran-pemikiran porpolitikan Soekarno.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Hamdan Hamid, *Demokrasi ala Soekarno*. Riau, Uin Sultan Srarif Kasim, 2012

<sup>21</sup> Farid *Pemikiran Marhenisme Soekarno Dalam Perspektif Filsafat Sosial*, Yogyakarta, Uin Sunan KaliJaga, 2002

<sup>22</sup> Arfandi *Pemikiran Politik Soekarno Terhadap Nasakom*, Makasar, Univerrsitat Hasanuddin, 2016

<sup>23</sup> Susi Lestari, *Pengaruh Islam Dalam Pemikiran Soekarno*, Uin Sunan Kalijaga, 2010

Kelima. Skripsi yang disusun oleh Erfan Rolis nim 100210302024 pada tahun 2014 mahasiswa program studi pendidikan sejarah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas jember. Dengan judul pemikiran dan perjuangan Soekarno tentang demokrasi tahun 1933-1967, skripsi ini membahas kondisi lingkungan sosial, budaya politik dan ekonomi yang turut membentuk dan mempengaruhi soekarno tentang demokrasi.<sup>24</sup>

Selain karya-karya tersebut diatas masih banyak karya lainnya yang memuat pembahasa tentang Soekarno dan pemikirannya. Namun dalam pandangan penulis beberapa karya diatas belum secara spesifik membahas tentang pemikiran Soekarno konsep Bhineka Tunggal ika dalam perspektip Soekarno dengan merujuk pada buku-buku karangan Soekarno dan didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

penulis ingin mengangkat kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian ataupun tulisan-tulisan tentang Soekarno yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi dengan memfokuskan pembahasan Bhineka tunggal ika dalam perspektif Soekarno dan bagaimana Soekarno menyatukan masyarakatan yang berbeda-beda latar belakan budaya, agama , dan duku yang ada di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Erfan Rolis. *Semikiran dan Perjuangan Soekarno Tentang Demokrasi*, Jember, Fakultas Keguruan, 2014

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang objek utamanya adalah berupa buku buku. Dalam hal ini adalah buku karangan Soekarno yang membahas tema penelitian yang dilakukan. Penulis terlebih dulu menelusuri berbagai buku yang ada kaitanya dengan pembahasan skripsi ini.

### **2. Sumber data**

Sumber data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber data primer penelitian ini adalah buku karangan Soekarno yang berjudul *Dibawah Bendera Revolusi*, sebagai sumber untuk mengungkap konsep bhineka tunggal ika dalam perpektif Soekarno.

Sumber data skunder yaitu buku buku yang membahas mengenai kebhinekaan, adapun jurnal yakni jurnal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Konsep Bhineka Tunggal Ika Meneurut Perpektif Soekarno.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang berhubungan langsung dengan tema penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya untuk menata data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti. Mengenai teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini

ialah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari kebenaran melainkan upaya mencari pemahaman. Setelah data terkumpul secara baik dan teoritis kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan baik secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.<sup>25</sup>

- Interpretasi data

Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti, dalam hal ini datanya merupakan isi buku, untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.<sup>26</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mempelajari dan memahami makna makna yang ada, sehingga mudah untuk mengambil suatu kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan`**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam membaca dari sistematika, maka penulis akan membagi menjadi empat bab, yang terdiri dari:

Pada bab I adalah sebagai langkah awal untuk mengantarkan kepada pemahaman bab berikutnya. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

Pada bab II, berisi tentang landasan teori. Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya edisi kedua*, (Jakarta: Kencana). 23

<sup>26</sup> Rike, *Nilainilai Dalam AL Quran*, Uin Raden Fatah Palembang, Hal, 12.

diteliti serta kerangka pemikiran tentang “Konsep Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Soekarno”.

Pada bab III, berisi tentang bagaimana konsep Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif Soekarno. Menjelaskan tentang bagaimana pemikirang konsep Bhineka Tunggal Ika dari Soekarno dan bagaimana Soekarno dalam menyatukan masyarakat yang multikulturallime.

Dan pada bab IV yaitu bab terakhir, berisi kesimpulan dari penelitian ini yang dilanjutkan dengan saran-saran yang digunakan untuk perbaikan penelitian yang lebih komprehensif dan dari semua pihak serta kata penutup adalah akhir dari penelitian ini.